

Strategi Cina Menghadapi Kepentingan Amerika Serikat Terhadap China's One Child Policy

Pazli, S.IP, M.Si & Purwasandi

Abstract

This research describes about the strategy of China to confront the United State interest of one child policy. This policy is used to control the growth of population. This policy enables every family to have one child. Population problem is an important problem for the continuence of life an development of China. The purpose of this research is to describe one child policy and the effect of this policy, and the strategy used by China to overcome United Satate interest that interfere about the effect that appear such human right violation. China used one child policy because the imbalance of population with the total area related to economy, politic, and the prosperity of its people. But, this policy is thought to has violated human right. United State as the country that support human right, interfere on one child policy to reduce human right policy such as abortion, economic, and politic problems of China that increase quickly. Finally, this research finds out the strategy of China to confront the United State interest of one child policy by parcitipating on human right regime, and do the steps to overcome its ecomonic and politic wich has been the interest of United State.

Key Words: *One Child Policy, Human Right, Abortion, Interest, Startegy, Economic, Politic.*

Pendahuluan

Fenomena demografi banyak terjadi di negara-negara maju, lajunya pertumbuhan penduduk menjadi isu yang perlu diperhatikan karena padatnya penduduk dibanding luas wilayah negara tersebut. Di Cina, tingkat pertumbuhan penduduk sangat cepat. Karena pemerintahan Mao Ze Dong menyarankan untuk memiliki banyak anak dengan alasan bahwa semakin banyak penduduk maka suatu negara akan kuat. Diperoleh bahwa tahun 1959, populasi Cina 563 juta jiwa. Lalu, populasi pertumbuhan semakin meningkat dan tumbuh drastis yang mencapai 1 milyar jiwa pada awal tahun 1980. Hal ini dapat dikaitkan dengan imigrasi dan penurunan kematian bayi serta penurunan tingkat kematian karena kesehatan nasional membaik.

Masalah penduduk merupakan persoalan penting yang menyentuh langsung pada kelangsungan hidup dan perkembangan bangsa Cina, keberhasilan atau kegagalan dari kemajuan bangsa Cina serta pembangunan yang berkelanjutan antara penduduk di satu

sisi, dan ekonomi, masyarakat, sumber daya dan lingkungan di sisi lainnya. Sehingga pada pemerintah Deng Xiaoping membuat kebijakan berupa *One Child Policy* untuk membatasi banyak anak dalam satu keluarga. Pada tahun 1970, tingkat kelahiran di Cina mencapai 33.43 anak untuk setiap seribu orang. Namun setelah diberlakukannya *One Child Policy*, tingkat kelahiran melambat 17.7 anak untuk setiap seribu orang pada tahun 1993, dan laju pertumbuhan penduduk turun dari 25.83 jiwa per seribu menjadi 11.3 jiwa per seribu. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya *One Child Policy*, pertumbuhan penduduk di Cina dapat sedikit teratasi.

One Child Policy yang diberlakukan ini terdapat pada undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam *Population and Family Planning Law of the People's Republic of China (Order of the President No.63)*, kebijakan ini dituangkan dalam Bab III tentang Penghargaan dan Jaminan Sosial pada pasal 18 yang berbunyi “*The State maintains its current policy for reproduction, encouraging late marriage and childbearing and advocating one child per couple.*”¹ Kebijakan ini mengubah cara hidup Cina dengan memungkinkan setiap pasangan untuk memiliki hanya satu anak, dibandingkan dengan tiga puluh tahun yang lalu, ketika keluarga rata-rata memiliki enam anak. Kebijakan ini dipromosikan untuk menunda pernikahan dan persalinan dan memberikan kontrol kelahiran gratis, sterilisasi, dan aborsi di seluruh negeri. Namun hal ini tidak hanya tertuang dalam kebijakan saja, ada beberapa slogan dan penyuluhan yang diberikan pemerintah untuk mengaplikasikan *one child policy* tersebut. *One Child Policy* merupakan pembatasan yang membantu menurunkan populasi meroket, karena hal ini lah pemerintah Cina sangat keras dengan kebijakan yang dibuatnya supaya tercapai dan terealisasi sebagai sesuatu yang harus dipatuhi.

Perubahan demografi dan kependudukan di Cina merubah kebijakannya dalam hal mengatasi lajunya pertumbuhan penduduk. Kebijakan yang diambil berupa pembatasan anak melalui *One Child Policy* menghasilkan beberapa dampak negatif yang mengakibatkan banyaknya aborsi, pembunuhan, serta pelanggaran HAM lainnya. Pengambilan kebijakan ini guna untuk menekan lajunya pertumbuhan penduduk, yang jumlahnya sudah mencapai 1.3 milyar jiwa dengan luas negara 9.596.960 km² (data tahun 2011).

Kebijakan Cina yang dulunya bersifat tertutup menyebabkan informasi dalam negeri Cina tidak dapat diakses oleh media internasional, sehingga dunia internasional

¹ *Population and Family Planning Law of the People's Republic of China (Order of the President No.63* <<http://english.gov.cn/>>

tidak tahu bahwa banyak sekali terjadi pelanggaran HAM di Cina. Namun setelah pemerintah mengadopsi kebijakan *Open Door Policy* pada tahun 1978 yang ditandai dengan keterbukaan sistem ekonomi dan informasi, berbagai pelanggaran HAM yang terjadi mulai diketahui oleh dunia internasional. Dampak dari munculnya kebijakan *Open Door Policy* ini juga terlihat pada para aktivis Cina yang menyuarakan tentang HAM serta mendapat dukungan dari media dalam negeri maupun internasional, sehingga menarik simpati warga untuk mendukung menegakkan HAM di Cina.

Pemerintah Cina pun menganggap bahwa HAM haruslah mencakup pada kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi, makanya dengan konsep yang dianut oleh Cina dijadikan sebagai landasan mereka untuk kebijakan yang menurut dunia internasional khususnya Amerika, telah melanggar HAM warganya. Ditambah lagi dengan ajaran Konfusianisme yang banyak dianut masyarakat Cina dan disebut-sebut mempunyai andil yang besar terhadap pola pikir Cina. Sayangnya ajaran Konfusianisme ini tidak memiliki kajian tentang HAM dan kedudukan setiap individu, dimana hal tersebut menjadi nilai utama dalam konsep HAM secara universal.

Amerika sebagai negara yang bertujuan untuk menstabilkan keamanan dunia ikut serta dalam memperbaiki HAM di Cina. Duta besar Amerika Serikat untuk Cina Gary Locke menilai bahwa catatan HAM di Cina memburuk karena rezim komunis Cina terancam dengan munculnya demonstrasi pro-demokrasi. Ia mengatakan bahwa proses penegakan HAM di Cina naik turun, namun dalam beberapa periode, proses penegakan HAM itu tampak memburuk.² Amerika mendukung kaum liberalis Cina untuk menyuarakan banyaknya pelanggaran HAM di sana. Melihat bahwa banyaknya dukungan dari dalam dan dunia internasional, banyak aktivis Liberal Cina yang semakin berani untuk menentang pemerintah untuk menghapuskan kebijakan terkait HAM seperti *One Child Policy*.

Keberadaan Amerika sebagai negara yang lebih dahulu besar dan kuat dibanding dengan Cina, menjadikan Cina memilih untuk menjalankan pemerintahan dengan ideologi yang berbeda dengan Amerika, begitu pula dengan masalah HAM. Apa yang dilakukan Amerika sebenarnya merupakan wujud perhatian Amerika terhadap apa yang dilakukan Cina. Sementara Cina sendiri tidak pernah beranggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan pelanggaran, sebab dengan kebijakan yang dikeluarkan akan menjadikan Cina sebagai negara utuh, yang memiliki kesamaan dan bangkit bersama-sama.

² Aulia akbar, AS: *Penegakan HAM di Cina Memburuk*. < <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/penegakan-HAM-di-Cina-memburuk> > [diakses tanggal 3 Oktober 2012]

Implementasi *One Child Policy*

Penerapan *one child policy* yang mulai diberlakukan tahun 1978 ini memiliki pedoman utama untuk mengatasi masalah kependudukan dan pembangunan negaranya. Dengan mempertimbangkan kondisi dasar nasional, termasuk populasi yang besar, tidak memadainya sumber daya per-kapita dan rendahnya tingkat pembangunan ekonomi dan ilmiah, Cina terus-menerus akan mengikuti jalan sendiri dalam menangani masalah penduduk dan pembangunan. Ini akan memanfaatkan keahlian manajerial negara lain dan prestasi ilmiah dan mengatasi populasi sendiri dan masalah pembangunan sesuai dengan kondisi sendiri yang spesifik.³

Kondisi kependudukan yang berujung pada pembangunan ekonomi Cina memang harus diubah untuk perkembangan negaranya, ini menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan Deng Xiaoping untuk mengendalikan kelahiran. Dengan banyaknya penduduk, semestinya sumber daya dari negara haruslah sesuai agar tidak terjadi ketidak seimbangan antara sumber daya dengan jumlah penduduk. Kalaulah ini terjadi, Cina akan dianggap sebagai negara yang tidak melihat perekonomian rakyatnya dan dianggap sebagai negara yang miskin, karena perekonomian yang bagus akan membuat warganya sejahtera. Untuk itu Cina harus segera mengubah kebijakannya agar negara lain tidak memanfaatkan situasi yang tidak baik dan akan terbebani dengan hal tersebut.

Cina menghormati latar belakang budaya yang berbeda, keyakinan agama, dan konsep moral. Mempertimbangkan penuh kesatuan antara prioritas dan kondisi, hak dan kewajiban, sehingga Cina merumuskan dan melaksanakan rencana kependudukan, pembangunan dan kebijakan untuk memastikan bahwa semua anggota sosial menikmati kesempatan yang sama untuk pembangunan.⁴

Implementasi *one child policy* terkadang dilakukan dengan cukup keras. Misalnya bagi yang memiliki anak lebih dari satu akan dikenakan denda yang sangat besar, melakukan sterilisasi kepada pasangan yang memiliki anak dua atau lebih, pemasangan *intrauterine devices* (IUD) bagi wanita yang telah memiliki satu anak, serta aborsi apabila ada pasangan yang memiliki anak lebih dari satu. Terkadang kebijakan tersebut dilakukan dengan pemaksaan (*law coercion*).⁵ Pemaksaan tersebut seperti kurang mengindahkan aspek kemanusiaan dan tidak memperhatikan kesehatan reproduksi

³ Information Office of the State Council Of the People's Republic of China August 1995, Beijing, *A Social Undertaking That Benefits the People* <[http:// china.org.cn/english](http://china.org.cn/english)>

⁴ *Ibid*

⁵ Nosi Shafira, *Cina Kontroversi One Child Policy*. <<http://id.scribd.com/doc/96029104/CINA-Kontroversi-One-Child-Policy>> hal 3

masyarakat. Hal tersebut sempat dibenarkan oleh Zhao Bingli, wakil dari Komisi Perencanaan Keluarga Nasional, yang mengakui bahwa pada masa-masa awal pelaksanaan kebijakan ini, ada staff-staff yang kurang berpengalaman, kurang bertanggung jawab, bahkan kurang beradab dalam melaksanakan kebijakan perencanaan keluarga. Sekarang hal seperti itu sudah tidak bisa ditemukan karena telah ada undang-undang mengenai perencanaan keluarga yang diresmikan pada tahun 2002. Bagi yang mengimplementasikan *one child policy* dengan cara-cara yang tidak beradab tersebut akan dikenai hukuman, baik berupa denda ataupun diberhentikan apabila ia seorang pegawai negeri sipil, sehingga pemerintah dapat lebih melindungi masyarakat. Pemerintah Cina terkesan cukup lamban dan tidak tegas, karena cara-cara tidak beradab yang sempat digunakan dalam menjalankan kebijakan itu bisa saja membahayakan masyarakat, tapi undang-undang yang menjelaskan dan melindungi hak-hak warga dalam kebijakan perencanaan keluarga baru dibuat pada tahun 2002.

Hukuman bagi keluarga yang melanggar kebijakan ini tertuang dalam Bab IV tentang Kewajiban Hukum dalam *Population and Family Planning Law of the People's Republic of China (Order of the President No.63)* : Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang ini, melakukan salah satu dari tindakan tersebut, harus diperintahkan untuk membuat perbaikan dan diberikan peringatan disiplin, dan keuntungan melanggar hukum akan disita oleh departemen administrasi untuk perencanaan keluarga atau kesehatan masyarakat.

Melihat alasan-alasan yang berhubungan dengan dampak negatif dari *one child policy* tersebut, pemerintah harus memikirkan ulang kebijakan yang tepat dalam mengontrol kependudukan di Cina. Jumlah penduduk di Cina tidak bisa dibiarkan bertambah begitu saja, harus ada kebijakan yang mengontrolnya, karena apabila jumlah penduduk terus bertambah dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan sumber daya.⁶ *One child policy* inilah yang diharapkan akan membantu, namun kebijakan yang diperlukan oleh Cina bukanlah kebijakan naif yang membolehkan setiap keluarga hanya memiliki satu anak saja, karena dampak negatifnya cukup banyak. Karena saat ini tingkat fertilitas total Cina sudah sangat menurun, sudah saatnya Cina mengeluarkan kebijakan perencanaan keluarga yang lebih fleksibel.

One child policy ini tidak selamanya didukung oleh seluruh rakyat Cina. Keadaan ini membuat warganya memilih untuk memihak dan menentang terhadap kebijakan yang

⁶ Ibid,

diberlakukan sejak 1978 tersebut. Penentangan dari penerapan kebijakan ini tampak ketika pemerintah mengadopsi kebijakan *Open Door Policy*. Kebijakan Cina yang dulunya bersifat tertutup menyebabkan informasi dalam negeri Cina tidak dapat diakses oleh media internasional, sehingga dunia internasional tidak tahu bahwa banyak sekali terjadi pelanggaran HAM di Cina, termasuk terhadap *one child policy*. Dampak dari munculnya kebijakan *Open Door Policy* ini juga terlihat pada para aktivis Cina yang menyuarakan tentang HAM serta mendapat dukungan dari media dalam negeri maupun internasional, sehingga menarik simpati warga untuk mendukung menegakkan HAM di Cina.

Walaupun banyak protes diberbagai propinsi, masih ada warga Cina yang sepakat dan pro dengan pemerintah untuk menjalankan *one child policy*. Terutama mereka yang berada dalam sistem pemerintahan yang tergabung dalam Partai Komunis Cina. Karena mereka tidak mau mengambil resiko yang besar untuk menentang pemerintah, dan telah memiliki kesadaran akan banyaknya penduduk yang berada diperkotaan. Sehingga membuat ruang gerak setiap individu terbatas karena kepadatan penduduk tersebut. Apa lagi ada kelompok yang membantu pemerintah dalam sistem sterilisasi kelahiran yang tergabung dalam kelompok keluarga berencana Cina untuk menegakkan *one child policy* demi pembangunan Cina kedepannya.

Kepentingan Amerika Terhadap *One Child Policy*

Amerika sebagai negara adi kuasa memiliki tujuan dimana setiap manusia mendapatkan hak mereka masing-masing. Terlihat bahwa Amerika sangat mendukung mereka yang tidak mendapatkan haknya tersebut. Apalagi Amerika yang menganut sistem liberal mempunyai pandangan yang mengedepankan kebebasan setiap orang. Dengan demikian, setiap manusia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya dengan maksimal.

Konsepsi HAM dari perspektif liberalisme secara formal dapat dibaca dalam Deklarasi Kemerdekaan 13 negara-negara Amerika 1776 “...*we hold these truths to be self-evident; that all men created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, liberty, and the pursuit of happiness.*”⁷

Cina memiliki pandangan lain mengenai HAM. Dalam *International Human Rights Conventions in China* dinyatakan bahwa konsep HAM harus mencakup langkah-

⁷ Maurice Cranston (1983) dalam Prof. A. Mansyur Effendi, SH.M.S dan Taufani Sulimana Evandri, SH.MH. 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Hak-Hak dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia. hal.11

langkah kesehatan dan kemakmuran ekonomi, serta standar ekonomi hidup. Dalam masyarakat harmonis, kesejahteraan kolektif lebih diutamakan daripada hak-hak dari setiap individu dimana ada konflik antara keduanya.⁸ Dalam budaya konfusianisme dikatakan bahwa harmonisasi dan keamanan nasional akan dicapai melalui penghormatan kepada kelompok, bukan individu. Sehingga Cina menganggap HAM bukanlah untuk hak individu melainkan hak kelompok dan bersama.

Amerika sebagai negara yang besar tidak ingin dominasinya di dunia tersaingi oleh negara manapun. Hal inilah yang mendasari Amerika untuk melakukan campur tangan dengan alasan kebijakan yang diambil tersebut telah melanggar konsep HAM secara universal oleh pemerintah Cina terhadap warganya. Sebenarnya Amerika tidak hanya melakukan dominasinya di Cina, namun semua kawasan Asia dengan alasan stabilitas dunia internasional melalui penegakan HAM di kawasan tersebut.

Amerika mendukung kaum liberalis Cina untuk menyuarakan banyaknya pelanggaran HAM di sana. Melihat bahwa banyaknya dukungan dari dalam dan dunia internasional, banyak aktivis Liberal Cina yang semakin berani untuk menentang pemerintah untuk menghapuskan kebijakan terkait HAM seperti *one child policy* ini. Para pemikir Cina liberal ini kemudian melakukan berbagai cara untuk membuat rakyat Cina sadar akan hak-hak yang mereka miliki, baik itu melalui tulisan, seminar, dan lain-lain. Usaha pemikir Cina liberal ini tentulah banyak menemui kendala, salah satunya adalah kesulitan mengubah *mindset* rakyat Cina yang memang tidak mengenal konsep HAM sebelumnya.

Amerika memberikan bantuan kepada mereka yang membantunya dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya. Seperti halnya Chen Guangcheng yang dianggap oleh Cina sebagai pion dari Amerika yang dikatakan dalam situs resminya, karena selalu menyuarakan penolakan *one child policy*. Chen yang membuat gusar pihak berwenang Cina dengan memaparkan pengguguran dan pemandulan paksa dibawah *one child policy*.

Amerika memberikan jalan lain bagi mereka yang ingin melahirkan di Amerika. Dengan kata lain, Amerika mendukung para ibu-ibu yang ingin melahirkan anak lebih dari satu dan menentang *One Child Policy* yang dibuat oleh pemerintah Cina. Hal ini dikenal dengan tur melahirkan yang nantinya anak tersebut bisa mendapatkan kewarganegaraan Amerika yang dikelola oleh aktivis Amerika Cina.

⁸ China Society For Human Rights Studies. *International Human Rights Conventions in China*. http://www.Chinahumanrights.org/CSHRS/Magazine/Text/t20080604_349282.htm

Perjalanan yang dilakukan oleh ibu-ibu Cina untuk melahirkan di Amerika juga memiliki lembaga, karena apabila ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan datang dengan sendirinya ke Amerika mereka akan mendapatkan kesusahan, baik dibidang pencarian rumah sakit yang tepat dan fasilitas-fasilitas yang baik untuk melahirkan. Lembaga ini didirikan oleh aktivis Cina yang bekerjasama dengan Amerika, lembaga ini didirikan tahun 2007 dan telah memiliki 8 cabang di Amerika, yang dikenal dengan lembaga *Baby Care Center* dibawah naungan AS Yuezi Center. Secara teknis, lembaga ini dapat membantu setiap ibu hamil yang memenuhi syarat untuk perjalanan ke Amerika dengan fasilitas yang memadai. Biaya rata-rata untuk seluruh layanan termasuk biaya akomodasi dan rumah sakit di Amerika Serikat adalah antara 100.000 yuan (\$ 15,026) sampai 150.000 yuan. Klien perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk penerbangan dan biaya visa.⁹ Kecendrungan untuk melahirkan di Amerika membuat ibu-ibu hamil punya keinginan kuat untuk melakukan tur melahirkan. Dimana mereka menganggap bahwa dengan adanya fasilitas ini akan memudahkan mereka untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Namun hal ini tidak terbatas pada mereka yang ingin melahirkan anak pertama melainkan juga pada anak kedua yang tentunya tidak diketahui oleh pejabat Keluarga Berencana Cina.

Tidak hanya itu, banyaknya protes yang terjadi diantaranya di Guangxi, Szechuan, Guangdong dan lainnya. Seperti di provinsi Guangxi tahun 2007, warga protes karena kebijakan yang dianggap kontroversial. Demonstrasi ini tidak lepas dari gerakan perempuan Cina dan organisasi *All Girls Allowed*, dimana organisasi ini gencar membicarakan tentang hak perempuan, pembunuhan anak, *one child policy*, aborsi dan hak-hak lainnya yang dianggap tidak didapatkan oleh para pasangan di Cina. Apalagi akan diberikan hukuman berupa denda kepada yang tidak mentaati kebijakan tersebut. Hal ini lah yang memicu kemarahan warga, karena apabila tidak bisa membayar, harta benda ataupun barang-barang yang mereka miliki akan disita secara paksa oleh pemerintah, dan apabila Ia seorang pegawai negeri maka akan diberhentikan.¹⁰ Organisasi *All Girls Allowed* ini dalam situsnya selalu memperlihatkan penentangan terhadap *one child policy*, organisasi yang membantu memberikan informasi untuk memperlihatkan banyak terjadi pelanggaran bagi Cina. Organisasi yang didominasi oleh perempuan ini membuat

⁹ “___” Meningkatnya Jumlah Wanita Cina untuk melahirkan di Amerika Utara. <http://www.beritabaik.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=11&Itemid=4

¹⁰ Kabar Indonesia, *China: banyak anak, banyak denda.*, 26 Mei 2007. <<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=1&dn=20070526121202>> [Diakses tanggal 2 Oktober 2012]

pemerintah Cina risih, karena mereka tidak segan-segan untuk melakukan penentangan walaupun lebih gencar dalam situs yang mereka buat.

Amerika menganggap bahwa Cina merupakan ancaman besar bagi negaranya, terutama dominasi Amerika di wilayah Asia Pasifik. Ancaman yang ditakutkan berupa kestabilan keamanan, dimana Cina sebagai negara yang tumbuh dengan ideologi komunis memberikan banyak campur tangan di wilayah tersebut, seperti dukungan terhadap Korea Utara dimana Amerika dilain sisi membantu Korea Selatan dalam konflik Korea tersebut.

Pentingnya Cina dalam ekonomi global, keamanan, lingkungan, dan hal-hal lainnya telah berkembang, baik Pemerintahan Bush dan Obama bertujuan untuk menjalin kerjasama bilateral diberbagai bidang, sementara Amerika Serikat sangat tidak setuju dengan Beijing pada banyak isu-isu HAM.¹¹ Amerika akan selalu gencar dengan program penegakan HAM-nya, apalagi dampak-dampak yang dihasilkan oleh *one child policy* menjadikan jalan yang tepat untuk masuk kedalam internal Cina. *One child policy* yang notabenehnya pengendalian kelahiran, menjadikan isu HAM sebagai permasalahan yang gencar untuk dibela Amerika sebagai bentuk hegemoninya di dunia internasional. Dalam tindakan HAM ini, Amerika disaat pemerintahan Bush pernah memboikot Olimpiade Beijing 2008. Dengan alasan bahwa banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di Cina. Termasuk dampak yang dihasilkan oleh *one child policy*. Meskipun pada akhirnya Olimpiade tersebut tetap diselenggarakan, bahkan Presiden Bush tetap menghadiri upacara pembukaannya.

Amerika mengakui kepentingannya atas keberadaan Cina dalam interaksi dan dinamika internasional. Cina selalu diperhitungkan di dunia internasional, sebagai contoh dalam hak veto yang dimiliki Cina di PBB. Pengambilan keputusan PBB yang diakui banyak diarahkan dan terpengaruh oleh kebijakan Amerika. Apabila hubungan dengan Cina memburuk, maka hal ini akan dapat menghambat kebijakan Amerika dengan kepemilikan hak veto tersebut. Tampak bahwa hubungan politik Amerika dan Cina terus diupayakan sesuai dengan kesepakatan melalui apa yang telah diputuskan bersama. Hal ini terbukti dengan memperlihatkan bahwa permasalahan HAM tidak menjadi penghalang, dan akan tetap ada respon positif kedua negara untuk terus melanjutkan kerjasama melalui kongres bersama yang lebih terbuka dan tidak adanya politik yang tersembunyi dengan tujuan memberikan respon yang buruk disalah satu pihak.

¹¹ Ewen MacAskill and Tania Branigan. 2009 "Obama Presses Hu Jintao on Human Rights During White House Welcome," *Guardian.co.uk*, 19 Januari 2011; Helene Cooper and Mark Landler, "Obama Pushes Hu on Rights but Stresses Ties to China," *New York Times*. dalam Ibid.,

Amerika mengutip kekhawatiran tentang dampak dari pertumbuhan ekonomi yang kuat di Cina dan diplomasi Cina lebih tegas di arena internasional, kegagalan dalam prosedur untuk menjamin kualitas obat-obatan Cina, makanan, dan produk lainnya yang diimpor ke Amerika, Cina pun dikhawatirkan memiliki ketidakmampuan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual Amerika, dan praktek perdagangan dan kebijakan di Cina yang menyebabkan meningkatnya defisit Amerika tumbuh perdagangan dengan Cina, \$256 miliar pada 2007 dan diproyeksikan akan mencapai \$267 miliar di tahun 2008. Selama Kongres ke-110, dinyatakan bahwa Cina adalah mitra dagang Amerika yang kedua terbesar. Beijing juga diposisikan untuk memainkan peran potensial penting dalam upaya untuk menyelesaikan krisis keuangan global yang dikembangkan akhir tahun 2008, dengan bank sentral Cina pembeli utama hutang Amerika. Cina adalah pemegang terbesar kedua sekuritas Amerika dan pemegang terbesar obligasi Amerika yang digunakan untuk membiayai defisit anggaran federal.¹² Dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi Cina ini, Amerika tidak ingin nantinya ketergantungan dengan negara yang menurut mereka banyak melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya.

Kekhawatiran Amerika membuat mereka melakukan langkah-langkah agar perekonomian mereka juga lebih baik. Amerika mempertahankan puluhan dialog bilateral dengan Cina di berbagai tingkatan dan di beberapa lembaga. Dalam hal ini Amerika menfokuskan pada program SED dengan tujuan untuk memajukan hubungan ekonomi Amerika – Cina dan mendorong transisi lanjutan ekonomi Cina dengan keterlibatan pada tanggung jawab global.

Strategi Cina Terhadap Kepentingan Amerika

Cina mulai memperluas partisipasinya dalam rezim HAM Internasional selama 30 tahun terakhir. Cina pun telah menandatangani perjanjian internasional yang penting dan berinteraksi dengan berbagai lembaga internasional berkaitan dengan HAM.¹³ Cina memulai partisipasinya dan memasuki PBB tahun 1971, partisipasi yang dilakukan belum berperan penting dan menjadi anggota resmi dalam lembaga HAM.

Konsep HAM yang diberlakukan Cina mengalami perubahan sebagai bentuk

¹² “___”, 2011, *Kontradiksi Perubahan Kebijakan Luar Negeri Cina Terkait Masalah Hak Asasi Manusia Tahun 2005-2010*. [Diakses dari www.scribd.com pada 11 Maret 2012]

¹³ Dingding Chen. 2009. *China's Participation in the International Human Rights Regime: A State Identity Perspective*. Chinese Journal of International Politics. Vol. 2. hal. 1.

kepedulian yang bertujuan untuk perubahan dan keinginan pemerintah Cina dalam menangani kondisi HAM. Perubahan konsep HAM secara universal terbukti dengan dikeluarkannya 1991 *Human Rights White Paper* oleh pemerintah Cina. Selepas Peristiwa Tiananmen Square dan kecaman serta kritikan dunia internasional sekaligus para pemikir Cina Liberal, Pemerintah Cina pun menjadi lebih serius dalam mengakomodasi kebebasan berpendapat dan berpolitik.

Strategi besar yang telah mengarahkan kepada Kebijakan Luar Negeri Cina selama dekade terakhir muncul sebagai reaksi terhadap tantangan Cina menghadapi sebagai negara yang relatif lemah, tapi pertumbuhan cepat Cina dan aspirasi internasionalnya telah membuat negara lain gelisah dan mungkin menyebabkan mereka untuk menentang aktivitas internasional Cina. Kombinasi kebijakan yang dirancang untuk menumbuhkan reputasi Cina sebagai pemain internasional yang bertanggung jawab dan memelihara kemitraan dengan negara-negara besar berusaha untuk memastikan konteks internasional dimana Cina memiliki kesempatan untuk melanjutkan proses selama beberapa dekade modernisasi yang akan diperlukan jika ingin menjadi kekuatan besar.

Cina mengeluarkan laporan tentang HAM Amerika yang dikeluarkan oleh Cina dimulai pada tahun 2004 yang diberi judul *The Human Right of United State*. Dalam laporan tahun 2004 ini ada beberapa poin yang dikeluarkan oleh Cina, yaitu : 1) ada sejumlah besar orang Amerika dibunuh dengan senjata dan kejahatan kekerasan; 2) pemilu sering terpengaruh oleh uang dari kontributor kaya; 3) ada banyak tunawisma dan miskin dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin adalah sangat besar, dan 4) diskriminasi rasial masih sangat banyak hidup di Amerika.¹⁴

Laporan tentang HAM Amerika berikutnya dikeluarkan pada tahun 2011, dengan poin yang lebih besar terhadap pelanggaran HAM di Amerika. Adapun isi dari laporan Cina tentang HAM di Amerika mencakup pada semua isu yang terjadi di Amerika. Cina membaginya dalam beberapa poin yaitu: Kehidupan, properti dan keamanan pribadi (*Life, Property and Personal Security*), Tentang hak sipil dan politik (*Civil and Political Rights*), Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*Economic, Social and Cultural Rights*), Diskriminasi rasial (*Racial Discrimination*), Hak-hak perempuan dan anak-anak (*The Rights of Women and Children*), dan Pelanggaran HAM Amerika Serikat (*US Violations of Human Rights against Other Nations*)

¹⁴ China Daily Newspaper, *Human Right Of United State 2004*, <http://www.chinadaily.com.cn/cndy/content_15392452.htm>

Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Cina tentunya merupakan penentangan terhadap Amerika yang mengatakan bahwa negaranya mendukung segala bentuk HAM, dan mengecam pelanggaran HAM. Laporan *The Human Right of United State* bertujuan agar semua negara didunia melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap negara lain tersebut bukanlah sebagai bentuk bantuan yang nyata, tetapi ada maksud yang bertujuan berupa kepentingan negaranya dan melakukan intervensi. Termasuk apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Cina yang sebenarnya merupakan pengalihan fokus Cina agar lebih sibuk dengan keadaan hak asasi manusianya. Dilain hal ada kepentingan yang ingin dicapai Amerika, karena Cina mulai bangkit dalam hal perpolitikan maupun perekonomian dan melebarkan sayap kekuatannya sebagai negara yang mulai diperhitungkan oleh negara internasional. Cina menegaskan bahwa laporan tersebut menyarankan agar pemerintah Amerika melihat dan mengkaji ulang masalah HAM di negaranya, dan menghentikan praktek-praktek mengenai HAM sebagai instrumen politik untuk ikut campur dalam urusan internal negara lain, serta berhenti menggunakan dalih HAM untuk mengejar hegemoni dan kepentingan negaranya.

Kinerja politik yang dilakukan guna untuk memperbaiki sistem dalam membuka saluran demokrasi dan memperluas partisipasi warga dalam urusan politik. Cina memastikan untuk memberikan dukungan dan partisipasi non-komunis untuk menjalankan roda pemerintahan. Pengumpulan opini publik ketika merumuskan undang-undang juga diberlakukan untuk kepentingan utama publik. Selain itu, pemerintah akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan adanya kebebasan warga untuk berbicara dan hak untuk didengar yang dilindungi sesuai dengan hukum.¹⁵ Namun sistem pengawasan akan ditingkatkan untuk pelaksanaan kekuasaan dan menjamin hak warga negara dalam pengawasan demokratis.

Cina melaksanakan politik luar negeri yang independen atas dasar prinsip hidup berdampingan, sesuai dengan kebijakan *Peacefull Coexistence*.¹⁶ Prinsip-prinsip tersebut meliputi menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, semua negara memiliki derajat yang sama dan saling menghormati dalam hubungan internasional, penyelesaian sengketa dalam hubungan internasional melalui konsultasi secara bersahabat, dan tidak melakukan agresi terhadap negara lain. Dalam

¹⁵ Beijing Declaration and Platform for Action China,. <<http://english.xinhuanet.com/beijing-declaration-and-platform-for-action-china>>

¹⁶ Koesmawan. Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke Cina: Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia-Cina. 2002. Jurnal Ekonomi & Bisnis, No. 2, Jilid 7. Hal 4

menunjukkan legitimasi dan prestise, pemerintah menggunakan *foreign affair* sebagai landasan kebijakan luar negeri.

Cina melakukan kinerja politik dengan cara melakukan keseimbangan dalam hubungan dengan negara lain diberbagai kawasan. Arah dari perpolitikan Cina bertujuan untuk menciptakan situasi internasional yang aman untuk kemajuan perekonomian negaranya, untuk mencapai tujuannya ini Cina melakukan cara dengan menghindari konfrontasi dengan negara lain. Dalam hubungannya dengan Amerika, Cina selalu mengenyampingkan permasalahan HAM yang selalu dikaitkan dengan negaranya. Cina terus membangun kerjasama yang baik untuk keamanan dunia dan menghindari adanya ancaman yang timbul atas apa yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan mempertahankan hubungan internasional yang bersifat multipolar, tidak hanya didominasi oleh Amerika yang merupakan ancaman bagi Cina. Oleh karena itu, Cina menghindari diplomasi konkrit dan inisiatif militer yang bersinggungan langsung dengan kepentingan Amerika, serta tetap melegitimasi norma internasional. Hal ini untuk memenuhi kepentingan nasionalnya melalui pertumbuhan ekonomi dan menciptakan negara yang cinta damai dalam sistem internasional.

Melalui rencana Cina kedepannya tentang ekonomi warga negaranya, Cina akan memberikan prioritas pada perlindungan hak rakyatnya dalam subsistensi dan pembangunan. Cina akan selalu mencari langkah yang tepat untuk menjamin dan meningkatkan mata pencaharian rakyatnya, begitu juga dengan rencana-rencana lainnya berupa perlindungan hak-hak ekonomi yang memastikan manfaat pembangunan bagi seluruh rakyat. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan perhatian warga negaranya, dari kepentingan Amerika yang ikut campur dalam internal Cina menjadikan permasalahan bersama untuk mengatasinya. Cina melakukan langkah untuk peningkatan ekonomi negaranya. Meskipun Amerika memperlakukan HAM Cina, Cina tetap menjalankan berbagai upaya untuk peningkatan perekonomian negaranya.

Cina melakukan zona ekonomi khusus sebagai strategi pembangunannya dibidang ekonomi. Zona ekonomi khusus ini memberikan perlakuan khusus bagi investor asing seperti pembebasan kewajiban pajak, peniadaan dan pengurangan hambatan tarif sehingga negara dapat berintegrasi dengan perekonomian global. Pengembangan zona ekonomi khusus merupakan salah satu kunci pendorong keberhasilan pembangunan di Cina. Pengembangan zona ekonomi khusus sendiri melibatkan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang memiliki peranan dengan pihak asing yang

membuka investasi asing di daerah tersebut. Pengembangan zona ekonomi khusus sendiri pertamakali diusulkan oleh pemerintah provinsi Guangdong.¹⁷

Cina akan selalu melakukan apapun untuk pembangunan ekonominya, karena dengan demikian akan menjadikan Cina sebagai negara dengan tingkat ekonomi yang sangat tinggi. Walaupun Cina disibukkan dengan permasalahan HAM yang banyak terjadi, Cina selalu gencar membangun negaranya. Baik dalam segi ekonomi maupun politik yang sebenarnya menjadi permasalahan utama Amerika melancarkan kepentingan-kepentingannya dengan dalih HAM.

Simpulan

One Child Policy diberlakukan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk menghasilkan dampak berupa pelanggaran HAM yang seharusnya tidak terjadi. Karena kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk bisa saja dilakukan dengan bertahap dan tanpa ada terjadi pelanggaran HAM seperti aborsi dan sebagainya. Namun pemerintah Cina melakukan *one child policy* ini dengan tegas untuk mencapai tujuannya mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk.

One child policy yang berujung pada pelanggaran HAM, Amerika sebagai negara yang mendukung penegakan HAM ikut campur dalam pelaksanaannya. Amerika memiliki kepentingan-kepentingan yang sebenarnya bukanlah berujung pada penegakan HAM saja, tetapi ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan melihat perubahan yang terjadi di tubuh Cina. Kepentingan Amerika yang tampak jelas dibidang ekonomi dan politik, dimana Amerika melihat bahwa dengan pengambilan *one child policy* ini, Cina memiliki pengaruh besar untuk menggantikan dominasi Amerika yang selama ini mereka bangun. Untuk itu, Amerika melancarkan berbagai cara untuk mencapai tujuannya.

Melihat keikutsertaan Amerika yang semakin meluas dan mencampuri urusan internalnya, Cina melakukan strategi-strategi untuk mengatasi kepentingan tersebut agar tidak terlalu jauh dan membuat pemerintah gusar dengan apa yang dilakukan oleh Amerika sebagai bentuk pencapaian tujuannya. Cina mulai ikut serta dalam rezim HAM dan mendukung HAM sebagai bentuk perhatiannya terhadap apa yang terjadi di negaranya, karena permasalahan utama Amerika dari *one child policy* berupa banyaknya pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut. Cina mengeluarkan laporan

¹⁷ Wiryawan, Bangkit A. *Zona Ekonomi Khusus Strategi China Memanfaatkan Modal Global*. Depok: Yayasan CCS., 2008. pp 1-37

tentang HAM Amerika pada tahun 2004 dan 2011, sebagai bentuk penentangan yang berisi pelanggaran-pelanggaran HAM Amerika. Penegasan dari pemerintah Cina menginginkan agar Amerika lebih memfokuskan pada HAM mereka sendiri dan janganlah mencampuri urusan negara lain dengan dalih HAM.

Cina melakukan kinerja lebih untuk mendapatkan dukungan dari warga negaranya dengan cara peningkatan layanan kerja, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, guna peningkatan ekonomi rakyat. Cina juga mencari dukungan dari negara lain dan berhubungan baik. Keaktifan ini semata-mata hanya bertujuan untuk mengamankan posisi diri dengan tetap berfokus pada pembangunan ekonomi nasional, tanpa banyak memberikan komitmen yang bersifat mengikat dalam institusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Erika, 2009, *Peran Pemikir Cina Liberal dalam Mengkonstruksi Konsep dan Nilai Hak Asasi Manusia di Cina, serta Hubungannya dengan Kebijakan Luar Negeri Cina Terkait Masalah Hak Asasi Manusia*. Diakses dari www.scribd.com pada 11 Maret 2012
- Jemadu, Aleksius, 2008. *Politik dan Global dalam Teori & Praktik*. Bandung: Graha Ilmu
- McGiffert, Carola. *Smart Power in U.S.-China Relation: A Report of the CSIS Commission on China*. Center for Strategic & International Studies
- Richards, Lucinda. 1996. *Controlling China's Baby Boom*. Contemporary Review Jan.. Select Plus.
- Robert G Sutter. 2008. *Chinese Foreign Relations: Power and Policy since Cold War*. Maryland: Rowman & Littlefield Publisher, Inc
- Robert Weatherley. 1999. *The Discourse of Human Right in Cina, Historical and Ideological Perspective*. London: Macmillan Press.
- Sukisman, WD. 1993. *SEJARAH CINA KONTEMPORER (Dari Revolusi Nasional Melalui Revolusi Kebudayaan Sampai Modernisasi Sosialis)*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Jurnal:

- China Human Right, *HUMAN RIGHT MAGAZINE, CSHRS Actively for International Exchanges and Cooperation* vol. 02 tahun 2002
- Dingding Chen. 2009. *China's Participation in the International Human Rights Regime: A State Identity Perspective*. Chinese Journal of International Politics. Vol. 2.
- Fong, Vanessa L. 2002. *Research Article: China's One Child Policy and The Empowerment of Urban Daughters*. American Anthropological Association

Poston, Jr., Dudley L. 2001. *Son Preference and Fertility in China*. USA Department of Sosiologi Texas A&M University.
Spire Research & Consulting. 2009. *China's One Child Policy in The 21st Century: Moving Beyond "Late, Long and Few"*. Spire Research & Consulting pte ltd

Internet:

China Human Right, *HUMAN RIGHT NEWSPAPER, the Human Right of US* 2011
<<http://www.chinahumanrights.org/CSHRS/newspaper/index.htm>>
Information Office of the State Council Of the People's Republic of China August 1995, Beijing, <<http://china.org.cn/english/>>
Population and Family Planning Law of the People's Republic of China (Order of the President No.63 <[http:// china.org.cn/english](http://china.org.cn/english)>